

BAB IV

STRATEGI FILIPINA

Dalam menghadapi Konflik Laut China Selatan ini, mau tidak mau Filipina harus mengupayakan langkah-langkah strategi yang akan dilakukan agar bisa bertahan dari sengketa ini. Bagaimana pun, Filipina tidak mau kehilangan sebagian wilayah territorial lautnya yang mengandung Sumber Daya Alam seperti mineral dan ikan-nya yang melimpah. Diantara strategi-strategi yang sudah dijabarkan dalam table matriks SWOT, hingga saat ini ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Filipina. Langkah-langkah tersebut tidak hanya dengan penguatan militer, tetapi juga dilakukan dengan cara diplomasi.

A. Cara Diplomasi

1. Mengajukan kasus ini ke Pengadilan Arbitrasi Internasional (*Permanent Court of Arbitration*)

Pada tahun 2013, Pejabat-pejabat Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan, berdasarkan perjanjian PBB tahun 1982, kedua negara menandatangani perjanjian yang memungkinkan Filipina mengajukan arbitrase secara sepihak. Wakil Menteri Luar Negeri Filipina untuk isu kelautan, Gilberto Asuque, mengatakan, arbitrase internasional di bawah Konvensi PBB UU Kelautan (UNCLOS) hukumnya adalah wajib. Beliau juga mengatakan bahwa proses pengajuan arbitrase ini telah dimulai. Hal ini tidak bisa diganggu. Tindakan China tidak dapat mengganggu penyelesaian proses tersebut karena dalam UNCLOS tidak ada pasal yang mengatakan bahwa Anda dapat

mengganggu atau menghalangi proses itu. Pengajuan arbitrase oleh Filipina itu menyatakan China melanggar UNCLOS – aturan penunjukan zona eksklusif ekonomi dari sebuah negara, yaitu 200 mil (370 kilometer) dari garis pantainya. Pengajuan arbitrase itu juga menyebut klaim China yang sudah berabad-abad terhadap hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan adalah ilegal.¹

Menanggapi pernyataan Departemen Luar Negeri Filipina tersebut, Duta Besar China untuk Filipina mengirim kembali pemberitahuan arbitrase ke pihak Filipina. Kemudian dalam jumpa pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei mengatakan, pengajuan itu “bukti-buktinya cacat.” Ia mengatakan, tindakan Filipina itu banyak membuat kesalahan dari segi sejarah dan hukum, termasuk tuduhan tidak benar terhadap China. Ia mengatakan China tidak bisa menerimanya. Dalam beberapa tahun belakangan, daftar protes diplomatik Filipina tentang dugaan intrusi China ke zona ekonomi eksklusif semakin bertambah. Filipina terus mengupayakan aliansi diplomatik di kawasan itu untuk memperkuat kasusnya. Filipina yang lemah secara militer itu juga telah memperbaharui Perjanjian Pertahanan Bersama dengan sekutunya, Amerika, yang mengamati dengan seksama perkembangan di kawasan itu.²

Pada Oktober 2015, Pengadilan Internasional PCA (*Permanent Court of Arbitration*) di Den Haag Belanda menerima dan menyatakan dapat

¹ <http://www.voaindonesia.com/content/filipina-akan-ajukan-sengketa-laut-cina-selatan-ke-pbb/1608471.html> Diakses pada tanggal 16 April 2016

² *Ibid*

menangani kasus konflik antara China dan Filipina atas wilayah di Laut China Selatan, pernyataan pengadilan ini mengesampingkan keberatan dari Beijing yang menyatakan bahwa badan Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini. Pandangan pengadilan ini jelas menjadi sebuah pukulan bagi China, yang sudah mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam setiap upaya arbitrase. Kasus ini berawal dari pengajuan gugatan oleh Filipina pada Januari 2013 lalu dengan alasan bahwa klaim China atas wilayah perairan itu tidak sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut sehingga seharusnya dinyatakan tidak sah. Filipina juga berpendapat bahwa pendudukan China atas pulau karang tidak menghasilkan kepemilikan atas wilayah perairan di sana.³

Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) sendiri adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang terletak di Den Haag di Belanda. PCA bukan berarti pengadilan "dalam arti tradisional", tetapi PCA menyediakan jasa sidang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota, organisasi internasional, atau pihak swasta yang timbul dari perjanjian internasional. Kasus-kasus dan berbagai masalah hukum yang melibatkan batas-batas teritorial dan maritim, kedaulatan, hak asasi manusia, investasi internasional, dan perdagangan internasional dan regional. PCA didasari melalui dua konvensi multilateral yang terpisah dengan gabungan keanggotaan sebanyak 121 negara. Pengadilan ini didirikan pada tahun 1899 oleh

³ http://internasional.kompas.com/read/2015/10/30/09024071/Pukulan.bagi.China.Dalam.Sengketa.dengan.Filipina?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related Diakses pada tanggal 29 April 2016

Konferensi Perdamaian Pertama di Den Haag di bawah Artikel 20 hingga 29 tahun 1899.⁴

China melakukan reklamasi besar-besaran atas kawasan pulau karang di wilayah yang masih menjadi sengketa antara beberapa negara di Laut China Selatan. Pemerintah Manila sudah meminta agar pembangunan itu dihentikan namun tak ditanggapi oleh Beijing. Pengadilan mengatakan memiliki wewenang atas tujuh masalah yang diangkat Filipina atas China namun kewenangan atas tujuh masalah lainnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ditambahkan bahwa mereka sudah menetapkan waktu pengadilan dengan harapan keputusan bisa dicapai tahun depan.⁵

Pengadilan Internasional akan mendengarkan penjelasan dari Filipina dalam *Public hearing* yang juga akan mengundang beberapa negara yang berada ada di kawasan Laut China Selatan, termasuk pendapat yang menyatakan karang dan timbunan pasir yang ada di Laut China Selatan dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayah teritorial. China sendiri telah membangun sejumlah pulau buatan di atas terumbu karang di laut dan mengklaimnya sebagai wilayah teritorial sejauh 12 mil. Selain itu, Filipina juga mengajukan tujuh tuntutan lainnya, termasuk tuntutan bahwa China telah melanggar hak kedaulatan Manila untuk mengeskplotasi wilayah perairan sendiri.⁶

⁴ <https://pca-cpa.org/en/about/> Diakses pada tanggal 03 November 2016

⁵ *Ibid*

⁶ <https://dunia.tempo.co/read/news/2015/11/25/118722260/ri-kirim-delegasi-ke-tribunal-arbitrase-laut-cina-selatan> Diakses pada tanggal 17 Mei 2016

Pada tanggal 24-30 November 2015, Tribunal Pengadilan Internasional menggelar *Public Hearing* dalam sidang pengadilan arbitrase yang diajukan oleh Filipina untuk menggugat China atas Laut China Selatan, di Den Haag. *Public Hearing* ini juga dihadiri Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Jepang yang mengirim utusannya sebagai pengamat. Selain itu *Public Hearing* ini bersifat tertutup dan hanya mendengarkan argumentasi gugatan Filipina perihal pokok perkara permasalahan.⁷

Berdasarkan keputusan penerimaan gugatan ini pada Oktober lalu, tribunal akan menjawab tiga persoalan dasar. Yakni, keabsahan soal *nine-dash lines*, penetapan soal gugusan yang di klaim di Laut China Selatan apakah itu adalah pulau yang berhak atas 200 mil laut zona maritime, ataukah karang yang hanya berhak 12 mil laut, atau elevasi daratan pasang surut yang tidak mempunyai sama sekali atas zona maritime. Selain itu juga akan diputuskan juga apakah aktifitas China di Laut China Selatan, seperti reklamasi, telah melanggar UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) khususnya tentang perlindungan lingkungan laut. Ketiga hal itulah yang akan dielaborasi Filipina dalam *Public Hearing* tersebut.⁸

Dalam sidang gugatan ini, tribunal tidak mengadili soal siapa pemilik pulau/karang, karena bukan wewenang Pengadilan Internasional. Jika Tribunal mengatakan *nine-dash lines* haram dan tidak berlaku, maka semua negara pihak yang terkait harus mengabaikan ke-sembilan garis dalam peta yang

⁷ Ibid

⁸ Ibid

diklaim China tersebut. Sehingga China dalam hal ini tidak lagi bisa menggunakan garis ini sebagai basis untuk klaim pulau atau karang di dalamnya. Dan jika Tribunal menyatakan bahwa gugusan karang di Laut China Selatan adalah karang dan elevasi daratan, dan tidak ada satupun berstatus pulau, maka siapapun pemilik karang tersebut tidak boleh mengklaim zona maritime sampai mendekati pantai-pantai utama negara-negara di sekitarnya.⁹

Adapun persoalan *nine-dash lines* adalah masalah semua negara yang meratifikasi UNCLOS, bukan hanya persoalan bilateral China-Filipina. Jadi, jika Tribunal menyatakan *nine-dash lines* haram, maka negara-negara akan lega karena benang kusut permasalahan ini bisa semakin terurai. China sebagai pihak yang digugat Filipina mengecam proses pengadilan dan sejak awal menolak perkara tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei menyatakan posisi negaranya sangat jelas, yaitu China tidak akan menerima, berpartisipasi, dan menolak semua putusan arbitrase yang tengah berlangsung tersebut.¹⁰

Meski China menolak, negara-negara lain menyambut upaya Filipina menggunakan hukum internasional untuk menguraikan permasalahan di Laut China Selatan. Selain dari negara-negara yang hadir di *Public Hearing* tersebut. Beberapa negara maju juga mendukung langkah Filipina ini, seperti Amerika Serikat yang sejak awal memang ada di pihak Filipina, setelah itu pada bulan Juni 2015, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

urusan Asia Timus dan Pasifik Daniel R. Russel mengatakan bahwa sebagai kedua negara yaitu China dan Filipina yang telah meratifikasi Konvensi UNCLOS, secara hukum mereka harus mematuhi keputusan pengadilan ini.¹¹

Dukungan juga mengalir dari Australia. Pada bulan Januari 2016, menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan bahwa keputusan oleh pengadilan di Den Haag dalam kasus yang diajukan oleh Filipina akan menjadi sangat penting sebagai pernyataan prinsip internasional, meskipun pernyataan China tidak akan mematuhi dan terikat oleh pengadilan tersebut, keputusan akhir Pengadilan Internasional akan dianut dan dijunjung tinggi oleh semua negara-negara lain yang juga mempunyai klaim atau kepentingan di wilayah tersebut.¹²

Yang terakhir dukungan dari Inggris, pada bulan April 2016, Hugo Swire, Menteri Negara untuk Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa ketegangan yang tumbuh di Laut China Selatan didorong oleh tindakan tegas China dan berharap keputusan terikat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Internasional dijadikan sebagai kesempatan bagi China dan Filipina memperbaharui dialog atas sengketa wilayah mereka. Dan Inggris akan berdiri bersama Amerika Serikat dan masyarakat internasional yang lebih luas dalam menanggapi keputusan pengadilan ini.¹³

¹¹ <http://www.reuters.com/article/southchinasea-china-usa-idUSL3N1043AM20150724> Diakses pada tanggal 22 Mei 2016

¹² <https://sg.news.yahoo.com/australia-nations-respect-tribunal-china-sea-200729405.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2016

¹³ <http://abcnews.go.com/International/wireStory/britain-aligns-us-response-south-china-sea-case-38492670> Diakses pada tanggal 26 Juni 2016

Hasil keputusan Pengadilan Arbitrase (Permanent Court of Arbitration) atas sengketa Laut China Selatan akhirnya dirilis pada tanggal 12 Juli 2016. Salah satu dari hasil keputusan itu menyebutkan bahwa pengadilan menolak semua klaim China atas hak ekonomi di wilayah yang selama ini ditandai dengan Sembilan garis putus-putus atau *nine-dash line*. Keputusan Pengadilan yang dikeluarkan di Den Haag itu menyatakan bahwa tak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak berdasarkan sejarah terhadap sumber daya di wilayah perairan yang termasuk di dalam *nine-dash line*.¹⁴

Mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China. Mahkamah mengatakan bahwa China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa China telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina.¹⁵

Beberapa keuntungan yang bisa diambil oleh Filipina dari keputusan ini adalah memperjelas legal klaim Filipina berdasarkan UNCLOS dan mendorong Filipina dan negara-negara lainnya memperjelas klaim mereka, membentuk dasar bagi negara-negara pengklaim untuk negosiasi di masa

¹⁴ <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160712172328-134-144369/pengadilan-arbitrase-tolak-klaim-china-di-laut-china-selatan/> diakses tanggal 18 Agustus 2016

¹⁵ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160712_dunia_putusan_lautcinaselatan diakses tanggal 18 Agustus 2016

mendatan. Namun yang terpenting dari keputusan ini adalah Hukum Internasional tidak mengakui *nine-dash line* yang dikeluarkan oleh pemerintah China.¹⁶

2. Mendesak ASEAN Untuk menetapkan Kesepakatan yang Mengikat antar Anggota

Selain dengan jalur pengajuan ke Mahkamah Arbitrasi, Filipina juga berusaha membawa permasalahan ini ke tingkat ASEAN. Filipina menginginkan ASEAN secara serius berfokus kepada permasalahan konflik Laut China Selatan ini, karena jika hal ini terus dibiarkan, maka akan mengganggu stabilitas kawasan ASEAN itu sendiri. Filipina menginginkan adanya kesepakatan yang mengikat antara 10 negara ASEAN dengan China. ASEAN sendiri sudah lama menghendaki yang dinamakan "Code of Conduct" (Pedoman Tata Tertib) antara ASEAN dan China untuk membereskan konflik seputar Laut China Selatan ini. Pedoman semacam ini sebenarnya sudah disinggung sebagai tujuan jangka panjang dalam deklarasi bersama antara ASEAN dan China tahun 2002. Tetapi karena deklarasi ini tidak bersifat mengikat maka hingga kini deklarasi tersebut tidak membuahkan hasil apa pun juga.¹⁷ Oleh karena itu, Filipina menginginkan komunike bersama menekankan dipatuhinya kesepakatan 10 tahun yang tidak mengikat antara China dan ke-10 negara anggota agar menangani klaim perebutan Laut Cina Selatan secara damai. Komunike itu

¹⁶ <http://thediplomat.com/2016/07/why-the-south-china-sea-arbitration-case-matters-even-if-china-ignores-it/> Dikases pada tanggal 24 Agustus 2016

¹⁷ <http://www.dw.com/id/pertikaian-teritorial-bayangi-ktt-asean/a-16385690> diakses pada tanggal 6 September 2015

juga menyerukan diadakannya "konsultasi formal" mengenai kode etik pada bulan September di Beijing. Pembicaraan itu rencananya akan melibatkan para pejabat tingkat bawah dan memusatkan perhatian pada langkah-langkah untuk menghindari konflik.¹⁸

B. Penguatan Militer Internal

Kekuatan militer Filipina yang lemah membuat posisi Filipina menjadi tidak menguntungkan jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi konflik dengan China. Hal ini dikarenakan sangat kurangnya jumlah alutsista-alutsista yang dimiliki Angkatan Bersenjata Filipina, tidak hanya dari segi jumlah, dari segi kualitas pun Filipina dapat dikatakan tertinggal dari negara-negara tetangganya. Banyak peralatan-peralatan alutsista Filipina berasal dari *Refurbish* dari jaman perang dunia kedua seperti yang terlihat dari inventori angkatan laut Filipina yang masih banyak kapal-kapal perang bekas Amerika Serikat jaman perang dunia kedua. Di matra Udara pun tidak kalah memprihatinkan, semenjak pesawat tempur F-5 Tiger milik Filipina dipensiunkan pada tahun 2005, Angkatan Udara Filipina tidak lagi mempunyai pesawat tempur supersonic yang masih operasional. Di matra darat, senjata-senjata yang dipakai ternyata masih banyak bekas dari perang dingin bahkan eks-perang Vietnam masih digunakan, seperti Senapan serbu M-16.

Dalam buku putih pertahanan Filipina yang tercantum di dalam *Philippine Defense Transformation White Paper*, di situ dijelaskan bahwa Laut

¹⁸ <http://www.voaindonesia.com/content/asean-sepakati-tata-perilaku-untuk-hindari-konflik-di-laut-cina-selatan/1695380.html> diakses pada tanggal 6 September 2015

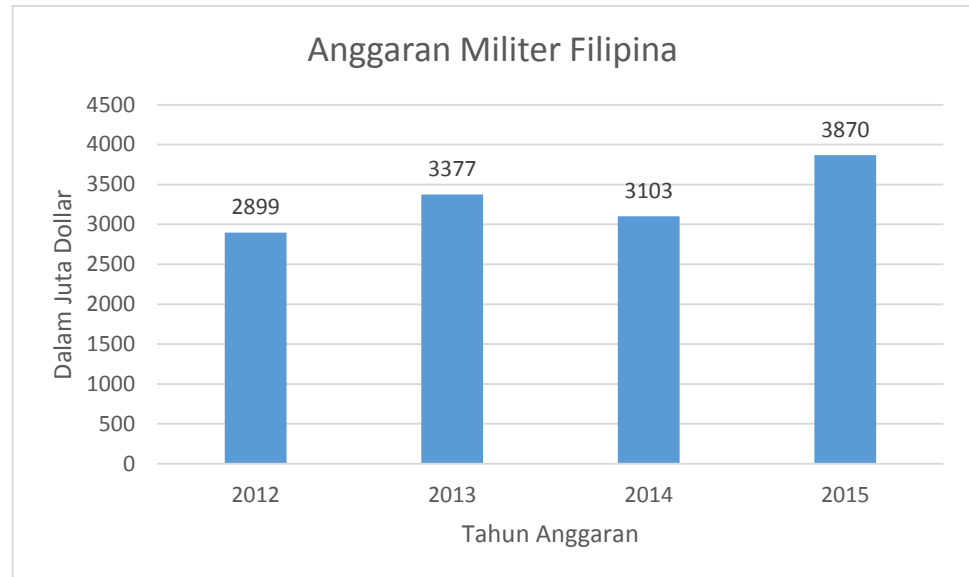
China Selatan (Laut Filipina Barat) merupakan lingkup area yang perlu untuk dipertahankan dan diamankan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan pertahanan merupakan topic utama untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁹

1. Peningkatan Budget Pertahanan

Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di bidang pertahanan ini, mau tidak mau Filipina juga harus meningkatkan jumlah dan kualitas senjata dan alutsista yang dimiliki. Salah satu caranya adalah Filipina harus menaikkan anggaran Pertahanan yang selama ini masih tergolong sangat kecil. Menurut data dari Sipri (*Stockholm International Peace Research Institute*) tercatat dari tahun ke tahun anggaran Filipina cenderung meningkat.²⁰ Hal ini diduga Karena pergerakan China di Laut China Selatan membuat Filipina mau tidak mau menambah anggaran belanja militer guna membeli dan melengkapi peralatan atau alutsista yang sudah tua. Kecenderungan kenaikan anggaran militer Filipina dapat dilihat dari table berikut:

¹⁹ http://www.dnd.gov.ph/pdf/PDT%20White%20Paper_Final_23Jul12.pdf by <http://www.dnd.gov.ph/> Diakses pada tanggal 23 September 2016

²⁰ <https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-world-regional-totals.pdf> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2016



Sumber Data : SIPRI Milex data 1988-2015.pdf from Stockholm International Peace Research Institute

2. Penguatan Angkatan Bersenjata Filipina

a) Angkatan Darat

- Akuisisi M-71 155mm meriam howitzers beserta amunisinya dari Elbit-Israel

Pada Februari 2015, Departemen Pertahanan Nasional atau *Department of National Defense* (DND) Filipina membuka tender untuk pengadaan Towed Howitzer 155mm sepaket dengan 240 buah peluru dan dukungan logistik untuk Angkatan Darat Filipina. Untuk

pengadaan ini Departemen Pertahanan Nasional Filipina menyediakan dana sebanyak 38 Juta Peso.²¹

Pada Juni 2015, DND mengumumkan Elbit System dari Israel, sebagai pemenang tender dari pengadaan Howitzer ini. Elbit sendiri menawarkan Soltam M-71 155mm towed howitzer untuk Angkatan Darat Filipina. Dan Elbit menjanjikan bahwa mereka akan mengirim senjata ini pada Maret 2017 nanti. Spesifikasi dari Soltam M-71 towed Howitzer ini bisa menembakkan beberapa tipe amunisi, seperti amunisi berpeledak tinggi, amunisi asap (fosfor putih dan sulfur trioksida), bahan kimia dan iluminasi. Untuk jarak tembaknya sendiri senjata ini mampu menjangkau target sejauh 21 km.²²

b) Angkatan Laut

- Dua kapal Strategic Sealift Vessel dari PT PAL, Indonesia.

Pada tahun 2014, pemerintah Filipina memesan dua kapal perang bertipe *Strategic Sealift Veassels* (SSV) dari Indonesia melalui PT PAL. Eksekutif PT PAL mengatakan bahwa kontrak pembelian kapal ini ditandatangani pada bulan Juni 2014 dengan nilai transaksi sebesar USD 92 juta untuk dua kapal dan kapal harus sudah diserahkan kepada Filipina pada tahun 2016 dan 2017. Kontrak tersebut juga menetapkan persyaratan bagi PT PAL untuk

²¹ http://www.dnd.gov.ph/transparency/procurement/DND_BAC/Invitation_to_bid/ITB-155mm%20Towed%20Howitzer%20with%20Ammunition%20Acquisition%20Project%202.pdf
Diakses pada tanggal 13 September 2016

²² <http://www.israeldefense.co.il/en/content/elbit-sell-six-towed-howitzers-philippines> Diakses pada tanggal 14 September 2016

memberikan paket dukungan terpadu yang akan memungkinkan industry dalam negeri Filipina untuk melakukan pemeliharaan dan *Maintenance* secara mandiri.²³

PT Pal mengkonfirmasi bahwa spesifikasi dua kapal SSV milik Angkatan Laut ini masing-masing akan dilengkapi dengan satu kanon 76mm di dek depan sebagai persenjataan utama. Dan dua senjata caliber 25mm juga akan dilengkapi di bagian buritan kapal, masing-masing kiri dan kanan. Menurut data *Jane's Fighting Ships*, SSV Angkatan Laut Filipina memiliki beban perpindahan penuh 11.583 ton. Kapal ini memiliki kapasitas angkut untuk 500 orang tentara, dapat menampung tiga helicopter besar, dan dapat menampung 126 kru. Kecepatan maksimum kapal ini 15 knot, jangkauan maksimum 9.360 Nautical Mile, dan daya tahan berlayar selama 30 hari. Selain kapal ini mempunyai fungsi sebagai kapal komando dan angkut personel, tank, hingga kendaraan amfibi. Kapal ini juga mempunyai fungsi lain sebagai fungsi *Search and Rescue (SAR)* dan sebagai kapal bantu rumah sakit jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam.²⁴

Diharapkan bahwa kapal ini nantinya bisa menjadi kapal yang bisa mendukung semua operasi militer Angkatan Laut Filipina, termasuk menjadi kapal markas di Laut China Selatan.

²³ <http://www.janes.com/article/40861/indonesia-s-pt-pal-signs-contract-to-supply-strategic-sealift-vessels-to-the-philippines> diakses pada tanggal 17 September 2016

²⁴ <http://www.janes.com/article/53644/pt-pal-outlines-weapons-fit-for-philippine-navy-ssvs> Diakses pada tanggal 21 September 2016

c) Angkatan Udara

- Akuisisi 12 pesawat tempur ringan FA-50 Golden eagle dari Korea Selatan

Di matra Angkatan Udara, sebelumnya Angkatan Udara Filipina tidak mempunyai pesawat tempur supersonik semenjak pesawat tempur supersoniknya yaitu F-5 Tiger dipensiunkan dari kedinasan. Sejak saat itu Filipina hanya mengandalkan sejumlah pesawat subsonic seperti AS-211 dan pesawat tempur baling-baling OV-10 Bronco yang jumlahnya termasuk tidak banyak dan tidak sampai dengan satu skuadron. Oleh karena itu modernisasi Angkatan Udara Filipina mutlak diperlukan, terutama saat ini hubungan Filipina sedang memanas dengan China di konflik Laut china Selatan.

Dengan tantangan teritorial baru yang dihadapi Filipina dan pasukan militernya yang sudah kuno dan penuh dengan inefisiensi, ABS-CBN Filipina berita merilis laporan bahwa Angkatan Udara Filipina (PAF) telah memutuskan untuk mengakuisisi dua belas pesawat tempur sekaligus pesawat latih FA-50 dari Korea Selatan.²⁵

Dari laporan tersebut ditunjukkan bahwa pesawat FA-50 ditawarkan dengan harga \$ 29.800.000 per unit dengan biaya paket total sebesar \$ 591.300.000. Pembelian ini merupakan bagian dari program modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina yang diperkirakan

²⁵ <http://www.artileri.org/2012/07/filipina-beli-12-jet-tempur-ta-50-korea-selatan.html> Diakses pada tanggal 23 September 2016

akan menelan biaya total sebesar \$ 1,5 miliar. Akuisisi FA-50 ini akan mencakup suku cadang dan penggantian, pelatihan, dukungan teknis yang diperlukan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan agar pesawat tersebut tetap beroperasi.²⁶

Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin mengatakan kepada ABS-CBN bahwa modernisasi Angkatan Udara Filipina merupakan prioritas mendesak mengingat sengketa wilayah teritorial baru-baru ini dengan China dan untuk memoles citra bangsa Filipina di mata internasional. Ketegangan baru antara Filipina dengan China memang telah muncul dalam beberapa bulan terakhir karena sengketa teritorial yang telah menyoroti kelemahan dalam kekuatan pertahanan Filipina, hal ini menciptakan kegelisahan tinggi dalam benak pemimpin Filipina. Kegelisahan ini telah mendorong pemimpin Filipina mengunjungi berbagai negara untuk mencari perangkat keras militer (contohnya pesawat ini) dengan harga terjangkau untuk memodernisasi kekuatan militer negara kepulauan itu. Laporan ABS-CBN menunjukkan bahwa kontrak perusahaan itu diharapkan akan selesai pada akhir tahun ini dengan pengiriman dua belas pesawat FA-50 akan selesai pada akhir 2015.²⁷

Pada hari Jumat 27 November 2015. Angkatan Udara Filipina (PAF) akan menempatkan 12 FA-50 “Golden Eagle” baru mereka tiga

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

pangkalan udara. Batch pertama yang terdiri dari dua pesawat tiba di pangkalan Clark Airbase, rumah Divisi Air PAF 1 di Clark Field, Pampanga.

Dengan menempati pangkalan ini pesawat akan bertugas untuk patroli wilayah udara negara itu, terutama di Barat Laut Filipina di mana China telah secara agresif mengganggu mereka dengan klaim “9-Dash line” di Laut China Selatan. Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin sebagaimana dikutip interaksyon.com mengatakan jet baru ini nantinya akan disebar di tiga pangkalan yakni Clark Air Base di Pampanga, Pangkalan Udara Subic di Zambales dan markas Komando Barat (Westcom) yang berbasis di Puerto Princesa City, Palawan.²⁸

FA-50 Filipina akan dilengkapi dengan senjata rudal udara ke udara jarak pendek dan rudal udara ke permukaan serta sistem penanggulangan seperti flare dan infra merah serta dipersenjatai dengan senapan mesin 20mm. Pegadaan senjata seperti zmissile dan bom pintar akan dilakukan terpisah yang membutuhkan waktu sedikitnya tiga tahun.²⁹

- Akuisisi 8 helikopter AW-109E yang dipersenjatai dari Augusta-Wesland

Tidak hanya mengakuisisi pesawat tempur dan pesawat angkut, Filipina juga memodernisasi armada helikopternya. Pada Oktober

²⁸ Ibid

²⁹ <http://www.jejaktapak.com/2015/11/28/golden-eagle-filiphina-mulai-datang-senjata-3-tahun-lagi/> Diakses pada tanggal 23 September 2016

2013, AgustaWesland Company memenangkan tender untuk menyuplai 8 Buah helicopter serang untuk Angkatan Udara Filipina. Dalam tender yang bernilai kontrak sebanyak 3.44 juta dollar ini, AgustaWesland harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh DND seperti sebagai berikut:

- Dilengkapi dengan peluncur roket
- Dilengkapi dengan dua senapan mesin kaliber .50
- Mampu bernavigasi di kondisi cuaca buruk
- Mampu beroperasi siang dan malam
- Menyertakan paket dukungan logistik
- Dan harus dikirim dalam waktu 540 hari kalender sesudah tanda tangan kontrak.³⁰

AW-109E adalah helikopter yang memiliki bobot 3 ton, delapan kursi dan dilengkapi dengan senapan mesin .50 dan peluncur roket 2,74 inch. Ditenagai dengan dua mesin Pratt and Whitney PW206C engines, helikopter ini memiliki kecepatan yang lebih baik, didukung dengan kemudahan pemeliharaan mesin. Helikopter ini nantinya akan digunakan oleh Angkatan Udara Filipina untuk operasi tempur, termasuk upaya bantuan tembakan dari udara, dan transportasi VIP.³¹

³⁰ <http://www.thephdefense.com/2015/09/philippine-air-force-2015-8-brand-new-attack-helicopters/> Diakses pada tanggal 24 September 2016

³¹ <http://www.airforce-technology.com/news/newsphilippine-air-force-to-receive-aw-109e-helicopters-by-year-end-4654107> Diakses pada tanggal 24 September 2016

- Akuisisi 2 pesawat angkut berat C-130T Hercules second dari Amerika Serikat.

Filipina telah menerima dua buah Pesawat angkut Lockheed Martin C-130T Hercules dari Amerika Serikat, yang diumumkan pada tanggal 6 April 2016 kemarin. Dua pesawat ini diakuisisi oleh Manila dengan menelan biaya sebesar \$55 juta, dimana Pemerintah Amerika Serikat membayar \$20 juta dari program Foreign Military Financing (FMF). Berbicara pada upacara untuk menandai kedatangan pesawat tersebut, Juru Bicara Angkatan Udara Filipina Kolonel Araus Robert Musico mengatakan bahwa pesawat ini nantinya akan digunakan sebagai pesawat utama yang digunakan untuk tujuan transportasi militer.³² Pesawat ini juga membantu Filipina dalam mengembangkan kemampuan pertahanan teritorialnya karena bisa mengirimkan personel dan kendaraan-kendaraan tempur ringan di wilayah yang bandarannya terpencil sekalipun. Selain itu pesawat ini juga memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bencana darurat, yang rutin terjadi di Filipina, seperti Topan Yolanda lalu.³³

Pesawat C-130T Hercules ini sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, Dimana pesawat ini termasuk dalam skuadron cadangan Armada Dukungan Logistik pada tahun 1991.

³² <http://www.janes.com/article/59318/philippines-receives-surplus-c-130s-from-the-us> Diakses pada tanggal 26 September 2016

³³ <http://globalnation.inquirer.net/117024/ph-buying-c-130-planes-from-us-for-p2-5b> Diakses pada tanggal 26 September 2016

Kedua pesawat tersebut sekarang bergabung dengan Angkatan Udara Filipina.³⁴

- Akuisisi 3 pesawat angkut sedang C-295M dari CASA-Airbus

Selain pesawat tempur, Angkatan Udara Filipina juga memodernisasi pesawat-pesawat angkut milik mereka. Daftar pesawat angkut yang akan mereka akuisisi yaitu pesawat angkut sedang C-295 dan pesawat angkut ringan NC-212. Pesawat angkut C-295 sebagai pesawat angkut taktis militer dapat membawa muatan 9 ton atau 71 personel bersenjata, juga dapat difungsikan sebagai pesawat angkut VIP. Kemampuan yang dimiliki pesawat angkut sedang ini adalah short take-off & landing (STOL) dari landasan yang kasar, hemat bahan bakar, serta mempunyai daya jelajah hingga 11 jam di udara.³⁵

Pemerintah Filipina memesan 3 unit pesawat angkut militer jenis C-295 ini pada April 2014 lalu dengan nilai kontrak sekitar US\$ 199 Juta. Pesawat pertama ini tiba 5 bulan lebih cepat dari pada yang dijadwalkan sebelumnya. Airbus Military menyerahkan satu unit pesawat transport C-295 kepada Angkatan Udara Filipina pada 18 Maret 2015 lalu. Penyerahan satu dari tiga unit pesanan Filipina ini dilakukan di Sevilla, Spanyol tempat perakitan akhir pesawat angkut ini. Pada tanggal 22 Maret 2015 lalu pesawat transport baru ini sudah tiba di Filipina untuk bergabung dengan Angkatan Udara Filipina.

³⁴ Op.cit, Janes

³⁵ http://alutsista.net/read/27/Airbus_Serahkan_Pesawat_C-295_Pertama_ke_Filipina Diakses pada tanggal 27 September 2016

Dua unit pesawat lainnya juga diperkirakan akan tiba di Filipina lebih cepat dari jadwal. Sebelumnya dua unit terakhir diperkirakan baru bisa tiba di Filipina tahun 2016.³⁶

Setibanya pesawat C-295 pertama ini di Filipina, tidak akan langsung bergabung dengan Angkatan Udara Filipina. Tetapi akan menjalani serangkaian inspeksi dan testing sekitar 3-5 hari kedepan. Setelah dinyatakan lulus inspeksi dan test, baru masuk ke Angkatan Udara Filipina. Kedatangan 1 dari 3 unit pesawat angkut C-295 ini akan menambah kemampuan angkatan Udara Filipina yang hanya memiliki sedikit pesawat angkut militer. Saat ini Angkatan Udara Filipina hanya memiliki 3 unit pesawat angkut militer kelas berat C-130 Hercules dan 3 unit pesawat angkut militer medium Fokker-27. Kedatangan 3 unit pesawat angkut C-295 ini jelas menjadi pelepas dahaga bagi Angkatan Udara Filipina.³⁷

- Akuisisi 2 pesawat Ringan NC-212i dari PT Dirgantara Indonesia

Filipina sendiri juga membeli pesawat angkut ringan NC-212 buatan PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia (Persero) memperoleh kontrak dari Filipina untuk pengadaan dua pesawat NC212i. kedua pesawat generasi terbaru dari NC-212-200 atau NC212-400 ini nilai kontraknya sebesar 820 peso Filipina atau sekitar

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

Rp 225 miliar. Proyek ini berasal dari Kementerian Pertahanan Filipina untuk keperluan Angkatan Udara Filipina.³⁸

PT Dirgantara Indonesia memperkirakan pengerjaan pesawat akan memakan waktu sekitar 18-20 bulan, sesuai kontrak yang diteken. Pesawat ini rencananya akan digunakan Angkatan Udara Filipina sebagai pesawat angkut ringan, Selain itu, proyek pembelian pesawat terbang ini ditujukan untuk meningkatkan upaya keamanan militer dan bantuan kemanusiaan. Rencananya adalah membeli pesawat yang dapat beroperasi dalam lingkungan apapun dan mampu memberikan dukungan untuk pertahanan, perdamaian dan keamanan teritorial, operasi keamanan dalam negeri, tanggap bencana dan pembangunan nasional. Pilihan PAF akhirnya jatuh ke NC-212i buatan PT DI.³⁹

C. Bantuan Militer dari Negara Lain

1. Bantuan dari US

- a) Bantuan dua kapal Ex Coast Guard 115m untuk Angkatan Laut Filipina

Pada tahun 2011, Pemerintah Filipina mengakuisisi 2 Kapal bekas US Coast Guard kelas Hamilton untuk program peningkatan kemampuan Angkatan Laut Filipina terhadap ancaman eksternal. Kapal tersebut yang

³⁸ <https://m.tempo.co/read/news/2013/12/30/092541054/filipina-pesan-dua-pesawat-pt-dirgantara-indonesia> Diakses pada tanggal 28 September 2016

³⁹ <http://finance.detik.com/read/2013/12/30/121655/2453903/1036/tutup-tahun-ptdi-jual-2-pesawat-made-in-bandung-ke-militer-filipina> Diakses pada tanggal 28 September 2016

diubah namanya menjadi BRP Gregorio del Pilar dan BRP Ramon Alcaraz, akan dikerahkan ke Laut Filipina Barat untuk mengamankan kawasan territorial Filipina.⁴⁰

Kapal ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Filipina, khususnya dalam melakukan patrol di laut lepas dan Operasi *Search and Rescue (SAR)* selama bencana. Jika jadi diakuisisi, kapal ini akan menjadi kapal perang terbesar yang dimiliki oleh Angkatan Laut Filipina. Kapal ini diakuisisi melalui *US Foreign Military Sales Program*, dan pendanaannya berasal dari dana proyek Malampaya. Biaya transfer akuisisi tersebut mencapai 450 juta Peso, dan biaya operasional selama 2 tahun diperkirakan sebesar 120 juta Peso.⁴¹

Kapal Pertama, BRP Gregorio Del Pilar (PF-15) pertama kali tiba di perairan Filipina pada tanggal 17 Agustus 2011. Kapal fregat kedua Angkatan Laut Filipina (Philippine Navy / PN), BRP Ramon Alcaraz (PF-16), tiba pada bulan Agustus, terlambat dari yang direncanakan akan datang pada bulan April. Keterlambatan lima bulan ini terkait dengan kebutuhan pelatihan yang lebih intensif untuk kru (AL Filipina) sebelum kapal dapat diambil dari North Charleston, fasilitas angkatan laut South Carolina, Amerika Serikat. BRP Ramon Alcaraz dilengkapi dengan senjata dan sensor yang lebih canggih dari kembarannya BRP Gregorio Del Pilar (PF-15). Fregat ini juga dilengkapi dengan meriam otomatis

⁴⁰ <http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=728691&publicationSubCategoryId=63> Diakses pada tanggal 29 September 2016

⁴¹ <http://www.gmanetwork.com/news/story/211298/news/nation/phl-navy-to-acquire-largest-ship-in-inventory> Diakses pada tanggal 30 September 2016

Mark 38 Model 2 Bushmaster dan mesin utama baru, membuatnya lebih unggul dari kakaknya. Sekitar 5 juta dolar telah dikeluarkan oleh Angkatan laut Filipina untuk biaya upgrade-nya. Fregat eks Angkatan Laut AS yang sebelumnya bernama USS Dallas ini adalah kapal cutter berdaya tahan tinggi yang ditugaskan pada tahun 1967 dari Galangan kapal Avondale di New Orleans.⁴²

Kedua kapal ini merupakan salah satu dari dua belas kapal cutter kelas Hamilton yang dibangun untuk US Coast Guard (penjaga pantai). Beratnya 3.250 ton, memiliki panjang 115 meter, lebar 13 meter, draft* 4,6 meter (muatan standar). Sistem propulsi terdiri dari dua mesin diesel dan dua mesin turbin gas, memberikannya kecepatan jelajah hingga 29 knot. Kapal ini memiliki rentang jelajah di kisaran 14.000 mil dan dengan waktu di laut selama 45 hari dalam pelayarannya. Kapal ini dioperasikan oleh 167 kru. Kapal fregat ini awalnya dilengkapi dengan radar AN/SPS-40 air-search, Sistem Kontrol Senjata Mark 92 dan dipersenjatai dengan satu meriam Oto Melara Mark-75 76-mm, dua sistem senjata mesin Mark K-38 25mm, dua Sistem Mark 36 SRBOC, satu Phalanx CIWS missile defense gun, senapan mesin M2HB kaliber .50 dan senapan mesin M240 7,62mm. Setelah diakuisisi oleh Filipina semuanya dicopot kecuali meriam Oto Melara Mark-75 76-mm.⁴³

⁴² <http://www.artileri.org/2013/03/filipina-terima-kapal-fregat-kedua-2013.html> Diakses pada tanggal 3 November 2016

⁴³ Ibid

b) 114 Buah kendaraan armor angkut personel M311A2 APC

Di matra Darat, Angkatan Darat Filipina juga tak luput dari program modernisasi guna meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan prajurit. Meskipun kondisi Angkatan Darat Filipina tidak terlalu mengawatirkan seperti matra yang lain (Angkatan Laut dan Udara), namun di beberapa sisi masih terdapa banyak kekurangan. Di antaranya ketiadaan kendaraan armor berat seperti Main Battle tank, serta jumlah kendaraan personel berarmor berat juga dirasa masih sangat kurang.

Melihat keadaan itu, pada tahun 2015 Filipina menyetujui pemberian kendaraan *Armed Personnel carriers* (APC) M113A2 dari Amerika Serikat sebanyak 114 unit. Program ini, yang bernama EDA (*Excess Defense Article*) adalah program Hibah yang berasal dari peralatan-peralatan militer Amerika Serikat yang jumlahnya berlebih, dan tanpa dipungut biaya untuk negara-negara sekutu Amerika Serikat. Transfer ini merupakan hasil dari permintaan formal yang dibuat oleh Angkatan Bersenjata Filipina untuk membantu dalam upaya modernisasi militer Filipina. Meskipun program hibah ini tidak dipungut biaya, Filipina tetap diharuskan membayar sendiri untuk biaya angkut kapal

sebesar 1,4 juta dollar yang membawa kendaraan armor ini dari Amerika Serikat ke Filipina.⁴⁴

Sebanyak 77 Unit M113A2 APC hibah dari Amerika Serikat tiba di Subic, Filipina pada tanggal 9 Desember 2015 dan 37 unit lainnya menyusul dan datang pada tanggal 4 Februari 2016 lalu. Transfer jumlah besar APC ini akan meningkatkan kemampuan armor dari militer Filipina yang terus berjuang menanggulangi pemberontak komunis dan teroris, dan jugaantisipasi dari ancaman keamanan dari luar menyusul menghangatnya isu sengketa di Laut china Selatan.⁴⁵

c) Satu buah kapal Research Vessel untuk Angkatan Laut Filipina.

Angkatan laut Amerika Serikat, mentransfer kapal Reseach Vesse (R/V) Melville ke tangan Angkatan Laut Filipina, selama upacara pada tanggal 27 April 2016 lalu di Naval Base San Diego. Ditangan Filipina, kapal ini di beri nama BRP Gregorio Velasquez, seorang pemimpin terkenal di komunitas ilmiah Filipina. Kapal itu ditrasnfer ke Filipina di bawah Program Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu Excess Defense Articles Program untuk membantu menambah kemampuan Filipina dalam bidang penelitian dan studi oseanografi.⁴⁶

⁴⁴ <http://www.vjdefense.com/2016/02/philippine-army-mechanized-infantry.html> Diakses pada tanggal 3 November 2016

⁴⁵ <http://www.rappler.com/nation/115490-armored-vehicles-philippine-military> Diakses pada tanggal 3 November 2015

⁴⁶ http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=94465 Diakses pada tanggal 3 November 2016

Dengan adanya kapal Research Vessel ini, akan menyediakan platform berharga dalam bidang oseanografi dan hidrogafi dalam mendukung operasi Angkatan laut Filipina, operasi pencarian dan pengambilan bawah laut, dan mendukung pelaksanaan bantuan kemanusiaan dan operasi tanggap bencana. Akuisisi kapal ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah dalam bidang survei dan penelitian ilmu kelautan dan mengumpulkan data ilmiah kelautan yang kedepannya akan bermanfaat bagi operasi Angkatan Laut. Lalu, kapal ini juga akan meningkatkan kemampuan untuk mendukung upaya perlindungan lingkungan dan eksplorasi negara untuk tujuan ekonomi.⁴⁷

d) Bantuan dana militer untuk Filipina

Selain itu, Filipina juga akan mendapatkan paket bantuan dana dari Amerika Serikat yang terbesar dalam 15 tahun terakhir untuk membantu negara tersebut untuk meningkatkan perlengkapannya, menyusul semakin meningkatnya ketegangan di wilayah Laut China Selatan. Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat, Jose Cuisia mengatakan bahwa dari pernyataan anggota *American Chamber of Commerce* di Manila, Filipina akan mendapatkan lebih dari 120 juta US dollar bantuan militer dari Amerika Serikat pada tahun 2016. Jumlah ini merupakan jumlah

⁴⁷ http://www.philnews.com/headlines/2016/headline_news_0614ag.htm Diakses pada tanggal 4 November 2016

terbesar sejak tahun 2000. Biasanya, Washington hanya meningkatkan jumlah bantuan dengan nominal persen yang kecil setiap tahunnya.⁴⁸

Rencananya Filipina akan menerima 79 Juta US Dollar dalam bentuk bantuan militer tahunan, jumlah ini naik disbanding bantuan tahun sebelumnya yang berjumlah 50 juta US Dollar, lalu Cuisia menambahkan bahwa Filipina juga akan mendapatkan tambahan 42 juta US Dollar dari program inisiatif maritime Asia Tenggara (*United States-Southeast Asia Maritime Initiative*) yaitu sebuah program pengembangan kapasitas maritime yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter. Kedua jumlah bantuan tersebut menjadikan bantuan militer terbesar semenjak tahun 2000. Dari mulai tahun 2002 hingga 2015, Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer Filipina dengan jumlah hamper sebanyak 500 juta US Dollar beserta berbagai jenis peralatan militer lainnya.⁴⁹

Pada bulan November 2015, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Manila mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan rekan sekutu-sekutunya di Asia Tenggara sebesar 256 juta US dollar dengan sebutan program "*Maritime Security Assistance*" dalam dua tahun. Meskipun Obama tidak menyebutkan China, namun Obama membuat pengumuman tersebut setelah menaiki kapal perang

⁴⁸ <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-to-get-largest-us-military-aid-package-since-2000> Diakses pada tanggal 4 November 2016

⁴⁹ Ibid

utama Filipina yang sebelumnya adalah kapal eks-penjaga pantai milik Amerika Serikat yang ditransfer ke Filipina, kapal tersebut menjadi armada utama Filipina dalam patrol di Laut China Selatan. Artinya, secara tidak langsung Obama membuat pengumuman tersebut dalam rangka merespon pergerakan agresif China di Laut China Selatan.⁵⁰

2. Bantuan Dari Jepang

- a) 10 Buah kapal Coast Guard 44 meter, pendanaan program ini berasal dari pinjaman lunak melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

Pada tanggal 18 Agustus 2016 lalu, Filipina secara resmi menerima salah satu dari 10 kapal patroli Coast Guard dari Jepang yang akan digunakan Filipina untuk menegakkan hukum maritim di wilayah teritorialnya.

Kapal *Multi-role response Vessel*, yang diberi nama BRP Tubbataha dan dibawah naungan Coast Guard Filipina ini dibangun oleh Japan Marine United Corp. Di Yokohama dan didanai sebesar 7,3 miliar peso (\$158 juta) dari program Japan International Cooperation Agency. Pemerintah Filipina memberikan kontribusi untuk program ini sebesar 1,4 miliar Peso untuk proyek sebanyak 10 kapal, yang kesemuanya diharapkan selesai pada tahun 2018.⁵¹

Menurut ketentuan proyek. MRRVs ini akan digunakan oleh PCG untuk tujuan berikut:

⁵⁰ Ibid

⁵¹ <http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/18/national/philippines-accepts-first-10-japan-funded-patrol-vessels-beef-coast-guard/> Diakses pada tanggal 7 November 2016

- Kapal penyelamat primer di wilayah tanggung jawab PCG ketika terjadi bencana
- Bantuan dalam pengendalian pencemaran minyak dan perlindungan lingkungan laut.
- Penegakan semua hukum maritim yang berlaku di laut teritorial Filipina, terutama berkaitan dengan Illegal Fishing dan patroli laut.
- Sebagai platform untuk respon bantuan cepat selama operasi bantuan bencana di daerah.
- Transportasi personel dan dukungan logistik.⁵²

Meskipun Jepang tidak secara resmi mengambil posisi dalam sengketa Laut China Selatan, Jepang telah mengkritik perilaku China dan mendesak Beijing menghormati aturan hukum dan penyelesaian sengketa secara damai. Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan juga memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di jalur laut yang paling sibuk tersebut, dan juga diyakini mengandung cadangan minyak dan gas alam yang berjumlah besar.⁵³

3. Bantuan dari Australia

- a) 2 buah kapal Landing Craft Utility dari Australia, dengan opsi pembelian 3 kapal yang sejenis sama.

⁵² <http://www.coastguard.gov.ph/index.php/11-news/1355-president-duterte-commissions-new-coast-guard-ship> Diakses pada tanggal 7 November 2016

⁵³ Op.cit, japantimes.co.jp

Pada tahun 2015 Australia menyumbangkan dua kapal Angkatan Laut Australia non aktif bertipe *Landing Craft Heavy (LCH)* kepada Filipina. Pernyataan ini dikemukakan setelah Filipina sedang berjuang dalam upaya menanggulangi badai super Haiyan yang melanda negara tersebut. Kapal yang telah dinon-aktifkan pada November 2012 ini, akan di refurbish dengan peralatan keamanan, keselamatan, dan navigasi yang modern sebelum diserahkan secara resmi ke Filipina pada Mei 2015. Dua kapal tersebut bernama HMAS Brunei (L 127) dan HMAS Tarakan (L 129) akan menjadi inventori Angkatan Laut Filipina dengan nama baru yaitu BRP Ivatan (AT 298) dan BRP Batak (AT299). Diharapkan kedua kapal ini bisa membantu meningkatkan kemampuan transportasi amfibi dan kemampuan bantuan bencana alam dan kemanusiaan.⁵⁴

Selanjutnya pada bulan Oktober 2015, pemerintah Filipina menandatangani kontrak pembelian tiga kapal bekas Angkatan Laut Australia dengan tipe yang sama . kapal tersebut sebelumnya dikenal dengan sebagai HMAS Wewak (L 130), HMAS Betano (L 133) dan HMAS Balikpapan (L 126) yang telah pensiun dari layanan Angkatan Laut Australia pada bulan Desember 2012. Tidak seperti dua kapal sebelumnya dimana Filipina bisa mendapatkan secara gratis, akuisisi kapal ini menelan biaya sebanyak 270 juta peso dan mulai diserahkan ke Filipina pada maret 2016.

⁵⁴ <http://globalnation.inquirer.net/118200/australia-gives-philippines-two-naval-landing-craft>
Diakses pada tanggal 5 Juni 2016

Balikpapan Class memiliki kapasitas angkut militer sebanyak tiga tank ukuran sedang atau yang berbobot sejenis. Jangkauan berlayarnya sejauh 3000 mil laut pada kecepatan 10 knot. Tiap LCH dapat menampung 13 awak termasuk dua petugas. Armamen kapal ini masing-masing dilengkapi dengan senapan mesin 12,7 mm ketika masih dalam layanan Angkatan Laut Australia.⁵⁵

D. Kerjasama Militer dengan Negara Lain

1. Latihan militer tahunan antara Filipina dan Amerika Serikat yang dinamakan dengan “Balikatan Military Exercise”

Pada tanggal 4 April 2016 lalu, Latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat yang di namakan “*Balikatan Military Exercise*” di Filipina. Balikatan, yang artinya Bahu-membahu dalam bahasa Tagalog itu, dimulai sebagai latihan militer tahunan antara Angkatan Bersenjata Filipina dan Amerika Serikat. Latihan ini difokuskan pada bantuan kemanusiaan, operasi bantuan bencana dan perang konvensional. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir ini, latihan ini telah menjadi acara latihan multilateral berkat bergabungnya Angkatan Bersenjata Australia. Latihan tahun 2016 ini melibatkan sekitar 5.000 tentara dari Amerika Serikat, 3.500 personel dari Filipina, dan 80 tentara dari Australia. Latihan militer Balikatan tahun ini menekankan pada tiga

⁵⁵ <http://www.janes.com/article/59058/philippines-receives-three-additional-ex-ran-landing-craft> Diakses pada tanggal 5 Juni 2016

factor. Yaitu berfokus lebih besar kepada pertahanan territorial, Kehadiran tiga kapal perang Angkatan Laut Jepang (JMSDF) sebagai pengamat, dan kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ashton Carter.⁵⁶

Latihan Militer Balikatan adalah acara latihan militer bersama tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan gabungan antara Filipina dan Amerika Serikat dalam hal kesiapan tempur, interoperabilitas, sekaligus untuk meningkatkan hubungan keamanan antar kedua negara dan menunjukkan dukungan Amerika Serikat kepada Filipina dalam melawan agresi eksternal.⁵⁷

2. Kerjasama militer EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) Filipina – Amerika Serikat

Pada tahun 2014 lalu, Filipina dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian dalam bidang militer yang bernama The Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). *The Enhanced Defence Cooperation Agreement* (EDCA) atau Perjanjian Peningkatan Kerjasama Pertahanan adalah perjanjian antara Amerika Serikat dan Filipina yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Filipina di bidang pertahanan militer. Perjanjian ini memungkinkan Amerika Serikat untuk mengirim pasukannya ke Filipina, selain itu Amerika Serikat juga mempunyai akses untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas di pangkalan Filipina, namun dengan beberapa persyaratan tertentu, salah

⁵⁶ <https://amti.csis.org/balikatan-exercise-highlights-territorial-defense-multilateral-approach/> Diakses pada tanggal 10 November 2016

⁵⁷ <http://www.globalsecurity.org/military/ops/balikatan.htm> Diakses pada tanggal 10 November 2016

satunya adalah Amerika Serikat tidak diperbolehkan untuk membangun pangkalan militer permanen, dan Amerika Serikat juga harus memberikan Filipina akses personil ke dalam kapal dan pesawat milik Amerika Serikat.⁵⁸

EDCA merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu Perjanjian *Visiting Forces Agreement* pada tahun 1999. Perjanjian EDCA ini ditanda-tangani oleh Menteri Pertahanan Filipina, Voltaire Gazmin dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina, Phillip Goldberg di Manila pada tanggal 28 April 2014.⁵⁹

Evan Medeiros selaku direktur senior keamanan nasional Amerika Serikat urusan Asia mengatakan bahwa perjanjian ini adalah kesepakatan pertahanan yang paling signifikan yang dapat disimpulkan bersama antara Amerika Serikat dan Filipina di decade ini. Menurut Duta Besar Goldberg, tujuan dari EDCA ini adalah untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Ketika mereka menguraikan langkah-langkah pertahanan kerjasama baru, perjanjian ini juga memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk merespon lebih cepat terhadap ancaman eksternal dan bencana alam dan kemanusiaan di wilayah Filipina.⁶⁰

Perjanjian ini dirancang untuk melengkapi perjanjian *Mutual Defense Treaty* pada tahun 1951 dan perjanjian *Visiting Forces Agreement*

⁵⁸ <http://globalnation.inquirer.net/133741/filipinos-asked-who-do-you-want-on-your-side>
Diakses pada tanggal 11 November 2016

⁵⁹ <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-27/philippines-to-sign-defense-deal-with-u-s-amid-china-tensions> Diakses pada tanggal 11 November 2016

⁶⁰ Ibid

pada tahun 1999. EDCA juga menegaskan kembali kerjasama antara Amerika Serikat dan Filipina untuk mengembangkan kapasitas individu dan kolektif pertahanan militer untuk menahan serangan bersenjata dengan cara meningkatkan interoperabilitas angkatan bersenjata kedua negara, lalu dengan mempromosikan modernisasi jangka panjang, membantu memelihara dan mengembangkan keamanan maritime, dan memperluas bantuan kemanusiaan dalam menanggapi bencana alam. Perjanjian tersebut juga memungkinkan pasukan Amerika Serikat untuk beroperasi di beberapa lokasi yang disepakati, lokasi tersebut didefinisikan sebagai fasilitas dan area yang disediakan oleh pemerintah Filipina dan digunakan oleh pasukan bersenjata Amerika Serikat dan Filipina, dan lain-lain sebagaimana yang telah disepakati. Perjanjian ini menangani semua control operasional dari tempat yang telah disetujui untuk memungkinkan Amerika Serikat untuk menaruh pasukan, material, peralatan, dan perlengkapan militer. Perjanjian ini juga menjelaskan bahwa material yang dimaksud tidak boleh membawa senjata nuklir.⁶¹

EDCA berlaku efektif untuk periode sepuluh tahun dan setelah itu, akan terus berlanjut secara otomatis kecuali perjanjian ini diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu tahun sebelumnya, melalui saluran diplomatic dengan niat untuk mengakhiri perjanjian. Dalam perjanjian ini telah disebutkan bahwa pasukan Amerika

⁶¹ "Document: Enhanced Defense Cooperation Agreement" Official Gazette via <http://www.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/> Diakses pada tanggal 12 November 2016

Serikat dapat melakukan pengendalian operasional, penempatan pasukan dan peralatan tempur, dan menampungnya di lokasi yang telah disepakati. Namun, Amerika Serikat tidak diperbolehkan untuk mendirikan basis militer permanen, dan harus menyediakan akses untuk Filipina ke basis, pesawat dan kapal perang Amerika Serikat. Karena status basis militer tersebut bukan milik Amerika Serikat, namun milik pemerintah Filipina dan Amerika Serikat diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.⁶²

Pada Maret 2016, Filipina telah menyetujui untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan lima pangkalan militer di mana pasukan dan perlengkapan militer Amerika Serikat dapat ditempatkan di pangkalan militer tersebut dibawah kesepakatan keamanan yang telah disepakati di tengah meningkatnya ketegangan dengan China dalam sengketa Laut China Selatan. Pada pertemuan dialog strategis bilateral Amerika Serikat – Filipina ke enam di Washington, Deputy Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat Amy Searight mengatakan kesepakatan itu dicapai berdasarkan perjanjian Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) yang telah ditandatangani kedua negara pada tahun 2014.⁶³

Kelima fasilitas militer yang diijinkan Filipina untuk digunakan Amerika Serikat adalah Pangkalan Udara Antonio Bautista di barat pulau Palawan di dekat Laut China Selatan, pangkalan udara Basa di Pampanga,

⁶² <http://www.gov.ph/2014/04/28/qna-on-the-enhanced-defense-cooperation-agreement/> Diakses pada tanggal 12 November 2016

⁶³ <http://www.philstar.com/headlines/2016/03/20/1564662/us-philippines-agree-5-base-locations-under-edca> Diakses pada tanggal 12 November 2016

Fort Magsaysay di Nueva Ecija, Bandara Lumbia di Cagayan de Oro, dan pangkalan udara Mactan-Benito Ebuen di Mactan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Philip Goldberg mengatakan bahwa pergerakan dan rotasi personil dan pasokan suplai ke lokasi pangkalan militer akan berlangsung sesegera mungkin. EDCA memberikan Washington untuk meningkatkan kehadiran militernya di negara bekas koloninya tersebut melalui rotasi kapal perang dan pesawat untuk operasi keamanan, kemanusiaan dan maritime. Hal ini memungkinkan tentara, kapal perang, dan pesawat Amerika Serikat untuk menempatkannya di lokasi militer Filipina secara berkala. EDCA ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2014, namun pelaksanaan perjanjian ini baru diadakan setelah Mahkamah Agung Filipina mensahkan legalitas perjanjian ini untuk dalam negeri Filipina pada bulan Januari 2016.⁶⁴

Pada tahun 1992, Amerika Serikat terpaksa menarik diri dari pangkalan militer mereka di Filipina, hal ini dikarenakan pemerintah Filipina tidak memperpanjang penempatan pangkalan militer tersebut. Tahun ini, dengan adanya EDCA, Filipina menjadi pembentuk utama dalam proyeksi kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat dalam menghadapi ekspansi maritime China di Laut China Selatan. Dalam pernyataan bersama yang dirilis dalam bialog bilateral itu, Filipina dan Amerika Serikat juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk

⁶⁴ Ibid

menganut prinsip Perjanjian Pertahanan Bersama (*Mutuak Defense Treaty*) pada tahun 1951.⁶⁵

Pangkalan Udara Antonio Bautista di Palawan merupakan daerah yang sangat penting dan seringkali tensinya sering berubah-ubah, karena diperebutkan hamper seluruhnya oleh Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan.⁶⁶

Pangkalan militer Basa di Pampama, di sisi lain adalah pangkalan utama Angkatan Udara Filipina yang berjarak sekitar 16 kilometer dari bekas pangkalan udara Amerika Serikat Clark.

Fort Magsaysay di Nueva Ecija adalah fasilitas militer terbesar yang dimiliki Filipina dan banyak digunakan sebagai area pelatihan. Fasilitas pelatihan meliputi pelatihan udara dan amfibi, survival di hutan dan perang gerilya. Pasukan Amerika Serikat sudah menggunakan sebagian kecil dari fasilitas ini untuk menyimpan persenjataan dan peralatan yang dibutuhkan untuk latihan militer tahunan dengan angkatan bersenjata Filipina.⁶⁷

Bagian dari Bandar Udara Lumbia di Cagayan de Oro akan diubah menjadi depot penyimpanan oleh Amerika Serikat untuk peralatan bantuan bencana dan kemanusiaan.⁶⁸

Pangkalan Udara Mactan-Benito Ebuena memiliki landasan pacu sepanjang tiga kilometer, yang mana landasan tersebut juga berbagi

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

dengan Bandar Udara Internasional Mactan-Cebu. Landasan tersebut dibangun oleh Angkatan Udara Amerika Serikat di pertengahan 1950-an sebagai landasan darurat untuk komando udara pembom strategis.⁶⁹

Selain lima pangkalan militer tersebut, masih dimungkinkan untuk Amerika Serikat menambah pangkalan militer yang mereka gunakan di Filipina, hal ini dikarenakan pada bulan Januari lalu, Filipina mengatakan telah menawarkan delapan tempat untuk digunakan oleh Amerika Serikat untuk Basis militer mereka, termasuk bekas pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Clark, dan bekas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pantai Subic, serta dua situs di Pulau Palawan di kawasan Laut China Selatan.⁷⁰

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid